

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

INSPEKTORAT

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tiada terhingga kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayahNya kami akhirnya dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan manajemen organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas misi organisasi Inspektorat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, karena berbagai keterbatasan yang ada kami menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan materi laporan ini masih kurang dari sempurna. Oleh karena itu kami amat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk dapat kami jadikan wacana penyempurnaan .

Dalam kesempatan ini pula, kami sampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Akhirnya harapan kami, semoga laporan sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai.

Simpang Empat, Januari 2021

**INSPEKTUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Drs. HARISMAN NST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630813 198903 1 007

DAFTAR RINGKASAN

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) .

Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yaitu” **Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Berintegrasi Untuk Mendukung Terwujudnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan”**

dengan 4 (Empat) misi yaitu :

1	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendorong ketaatan SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui pengujian dan konsultasi.
2	Meningkatkan peningkatan peran pengawasan melalui rekomendasi hasil pengawasan guna mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas SOPD melalui evaluasi,koordinasi dan perbaikan kebijakan.
3	Mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui review serta dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengawasan melalui pemantauan/monitoring dan evaluasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan alokasi dana anggaran dari APBD sebesar Rp 8.782.454.125,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 3.011.594.870,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp 5.770.859.255,-. Sedangkan realisasi alokasi anggaran adalah sebesar Rp 8.086.928.630,- atau 92,08%, yang terdiri dari realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.741.200.061,- atau 91,02%, dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 5.345.728.569,- atau sebesar 92,63%. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh keterlambatan proses belanja tambahan dan efisiensi belanja anggaran.

Meskipun secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dapat dikatakan berhasil, namun bukan berarti bahwa keseluruhan tujuan dan misi organisasi telah dapat dicapai. Karena ada kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun anggaran berikutnya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan kemampuan Daerah. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Januari 2021

**INSPEKTUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. HARISMAN NST
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19630813 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR RINGKASAN	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I : PENDAHULUAN.....	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
B. Struktur Organisasi	6
C. Sumber Daya Aparatur	7
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP	8
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II : RENCANA STRATEGIS.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja.....	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Indikator Kinerja.....	16
B. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	17
C. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.....	17
D. Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV : PENUTUP	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Strategi Pemecahan Masalah	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat berfungsi sebagai :

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati No.119 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Inspektur
- Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV

- Inspektur Pembantu Wilayah V
- Kelompok Jabatan Struktural dan Fungsional

- Inspektur : Drs. Harisman Nst
- Sekretaris : Juardi Lubis, ST,M.Eng
- Inspektur Pembantu Wilayah I : Mustaner, SE
- Inspektur Pembantu Wilayah II : Celly Decilia Putri, SE.Ak.,MM
- Inspektur Pembantu Wilayah III : Drs. Mujio
- Inspektur Pembantu Wilayah IV : Asri, SH., MM
- Inspektur Pembantu Wilayah IV : Saidan Mukhtar, SH
- Kasubag. Perencanaan : Rinaldi Roza, SE.,MM
- Kasubag. Analisis & Evaluasi : Viventi Kumala Sari, SP.
- Kasubag. Umum & Keuangan : Nazirwan, SE
- Auditor Madya : Fadli, SH
- Auditor Madya : Nelfi Heldi, SH
- Auditor Madya : Zakifni. ZA, SH
- Auditor Madya : Helen Nopris, ST. MT
- P2UPD Madya : Alpian, S.Pt.M.Si
- P2UPD Madya : Zamzami, SE.M.Si

C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 61 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 66 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Jan 2020 (orang)	Keadaan 31 Des 2020 (orang)
IV	13	13
III	17	22
II	2	4
I	-	-
Honor	29	27
Jumlah	61	66

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Jan 2020 (orang)	Keadaan 31 Des 2020 (orang)
S3	-	-
S2	8	8
S1	35	32
D III	5	5
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	12	15
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	61	66

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2020. Penyusunan LKjIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja (SAKIP) antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Atau pun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKjIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan LKJIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu: **"Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Berintegrasi untuk Mendukung Terwujudnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan"**.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebanyak 4 (Empat) misi sebagai berikut:

1	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendorong ketaatan SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui pengujian dan konsultasi.
2	Meningkatkan peningkatan peran pengawasan melalui rekomendasi hasil pengawasan guna mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas SOPD melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan.
3	Mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui review serta dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengawasan melalui pemantauan/monitoring dan evaluasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Adapun Tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Membangun SDM yang berkualitas
2. Membangun Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran strategis dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif
2. Meningkatnya pengawasan tertentu/khusus yang berdaya guna dan berhasil guna
3. Meningkatnya pengawasan reguler yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Meningkatnya kelancaran dan ketertiban administrasi pengawasan
5. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan
6. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan yang mandiri

B. RENCANA KINERJA

1. Rencana Kegiatan Tahun 2020

Untuk tahun anggaran 2020, program yang direncanakan kegiatannya adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
2. Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur.
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan / kendaraan dan mesin

Program Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah
2. Penyusunan Dan Penilaian Angka Kredit

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan
4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
5. Monitoring Dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
6. Review Penyerapan PBJ dan Dana Desa
7. Koordinasi Dan Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Aksi KPK
8. Evaluasi Penerapan SPIP
9. Survei Penilaian Integritas

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan kegiatan :

1. Diklat Teknis Penjejjangan Pejabat Fungsional
2. Peningkatan Kapabilitas APIP

3. Alokasi Anggaran

Bidang/ Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	922.408.694,-
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	552.555.500,-
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	142.703.194,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	227.150.000,-
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	432.249.100,-
Pengadaan peralatan / kendaraan dan mesin	432.249.100,-
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	87.991.500,-
Peningkatan kapasitas aparatur daerah	26.791.500,-
Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	61.200.000,-
<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>	1.308.497.326,-
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	840.700.000,-
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	153.504.076,-
Tindak lanjut hasil penemuan pengawasan	184.480.000,-
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	9.182.750,-
Monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	1.680.000,-
Review penyerapan PBJ dan Dana Desa	98.963.000,-
Koordinasi dan fasilitasi percepatan aksi KPK	5.351.000,-
Evaluasi Penerapan SPIP	14.636.500,-
Survei Penilaian Integritas	-
<i>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	254.377.500,-
Diklat Teknis dan Penjenjangan Pejabat Fungsional	155.839.500,-
Peningkatan Kapabilitas APIP	98.538.000,-
<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	6.070.750,-
Pengelolaan Penyelesaian Kerugian Daerah	6.070.750,-
Jumlah	3.011.594.870,-

3. Indikator Kinerja

Untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmerk dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2020 secara lengkap disajikan pada lampiran rencana kinerja tahunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (*Output*)**.

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2020

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 20 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 90 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 80 % sampai dengan di bawah 90 % predikatnya **“Cukup Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 60 % sampai dengan di bawah 80 % predikatnya **“Sedang.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 60 % predikatnya **“Kurang atau Gagal.”**

1. Membangun Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik

Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran membangun pelayanan administrasi perkantoran dengan baik adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%
<i>Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur</i>	131 unit	130 unit	99,24%
<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</i>	100%	99,49%	99,49%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (Output) dari 3 indikator kinerja dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dengan sangat baik adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%Pencapaian Sasaran
1	100%	Sangat Baik	1	100%
2	90% s/d < 100%	Baik	2	99,49% dan 99,24%
3	80% s/d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s/d < 80%	Sedang	-	-
5	0 s/d < 60%	Kurang/Gagal	-	-
	Jumlah	-	3	100%

Dengan demikian pelayanan administrasi perkantoran berpredikat “Sangat Baik” sebanyak 1 indikator sedangkan 2 indikator berpredikat “Baik”.

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur, adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
Pengadaan peralatan/kendaraan dan mesin	44 unit	43unit	97,73%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (*output*) dari 1 indikator sasaran strategis ketersediaan sarana dan prasarana aparatur adalah sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%Pencapaian Sasaran
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	90% s/d < 100%	Baik	1	97,73%
3	80% s/d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s/d < 80%	Sedang	-	-
5	0 s/d < 60%	Kurang/Gagal	-	-
	Jumlah	-	1	97,73%

Dengan demikian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang berpredikat “Baik” sebanyak 1 indikator.

3. Meningkatnya SDM Aparatur

Analisis pencapaian target 2 pada sasaran yaitu meningkatkan SDM aparatur adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
<i>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>			
Peningkatan kapasitas aparatur daerah	5 orang	3 orang	94,96%
Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	21 orang	20 orang	95,23%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari indikator sasaran strategis meningkatkan SDM aparatur tepat waktu adalah sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%Pencapaian Sasaran
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	90% s/d < 100%	Baik	2	94,96% dan 95,23 %
3	80% s/d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s/d < 80%	Sedang	-	-
5	0 s/d < 60%	Kurang/Gagal	-	-
	Jumlah	-	2	95%

Dengan demikian pencapaian 2 indikator peningkatan SDM aparatur yang berpredikat “**Baik**”.

4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Analisis pencapaian target 7 indikator kinerja pada sasaran Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	85 obrik	69 obrik	81,17%
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	25 kasus	12 kasus	48%
Tindak lanjut hasil penemuan pengawasan	75 %	75 %	75%
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	0 kali	4 kali	100%
Monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	1 dokumen	1 dokumen	100%
Review penyerapan PBJ dan Dana Desa	4 laporan	4 laporan	100%
Koordinasi dan Fasilitasi percepatan Pelaksanan Aksi KPK	1 laporan	1 Pelaporan	100%
Evaluasi Penerapan SPIP	0 OPD	0	0
Survei Penilaian Inegritas	0 laporan	0	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari 7 indikator sasaran strategis meningkatnya kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%Pencapaian Sasaran
1	100%	Sangat Baik	4	100 %
2	90% s/d < 100%	Baik	-	-
3	80% s/d < 90%	Cukup Baik	1	81,17 %
4	60% s/d < 80%	Sedang	1	75 %
5	0 s/d < 60%	Kurang/Gagal	1	48 %
	Jumlah	-	7	

Dengan demikian pencapaian Meningkatnya kinerja instansi pemerintah “**Sangat Baik**” sebanyak 4 indikator, berpredikat “**Cukup Baik**” sebanyak 1 indikator, berpredikat “**Sedang**” 1 Indikator dan berpredikat “**Kurang**” sebanyak 1 Indikator.

5. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Analisis pencapaian target 2 indikator kinerja pada sasaran yaitu peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
<i>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>			
Diklat Teknis Penjejjangan Pejabat Fungsional	14 orang	7 orang	50%
Peningkatan Kapabilitas APIP	3 level	2 level	66,67%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari 2 indikator sasaran strategis meningkatnya kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	90% s/d < 100%	Baik	-	-
3	80% s/d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s/d < 80%	Sedang	1	66,67%
5	0 s/d < 60%	Kurang/Gagal	1	50%
	Jumlah	-	2	

Dengan demikian pencapaian Meningkatnya kinerja instansi pemerintah “**Sedang**” sebanyak 1 indikator dan “**Kurang**” sebanyak 1 indikator.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp 8.782.454.125,- yang telah direalisasikan sebesar Rp 8.147.458.435,- atau sebesar 92,77%. dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	8.782.454.125,-	8.147.458.435,-	92,77 %
2	APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	-	-	-
3	APBN/Dekonsentrasi	-	-	-
4	APBN/Tugas Perbantuan	-	-	-
5	Bantuan Luar Negeri	-	-	-
6	Bantuan Masyarakat dan lain-lain	-	-	-
-	Jumlah	8.782.454.125,-	8.147.458.435,-	92,77 %

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	922.408.694,-	910.003.389,-	98,66%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	432.249.100,-	422.814.600,-	97,82%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.991.500,-	85.175.550,-	96,80%
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.070.750,-	6.070.750,-	100 %
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	1.308.497.326,-	1.076.895.250,-	82,30%
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	254.377.500,-	240.240.522,-	94,44%
	J u m l a h	3.011.594.870	2.741.200.061,-	91,02%

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 20 kegiatan dalam 7 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2020, untuk mendukung pencapaian 5 sasaran dalam indikator kinerja (*output*) dan 2 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 15 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan “**Sangat Baik**” sebanyak 5 indikator sasaran strategi.
 - Terlaksana dengan “**Baik**” sebanyak 5 indikator sasaran strategis.
 - Terlaksana dengan “**Cukup Baik**” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.
 - Terlaksana dengan “**Sedang**” sebanyak 2 indikator sasaran strategis
 - Terlaksana dengan “**Kurang**” sebanyak 2 indikator sasaran strategisHal tersebut berarti bahwa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 33,33% dengan klasifikasi pengukuran/penilaian : sangat baik, dan 33,33% dengan klasifikasi pengukuran/penilaian baik, dan 6,67% dengan klasifikasi pengukuran/penilaian cukup baik serta 13,33% dengan klasifikasi pengukuran/penilaian sedang dan 13,33% dengan klasifikasi pengukuran/penilaian Kurang.
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumberdaya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
 - Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
 - Efisiensi anggaran di tahun anggaran berjalan.
 - Dilakukannya refofusing anggaran pada bulan April, dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, sehingga terjadi pemotongan anggaran sebanyak 42%.

Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dalam mewujudkan visi.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur bidang pengawasan baik teknis maupun keuangan.
2. Penambahan personil baik struktural maupun staf pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.
3. Dalam penyusunan anggaran akan mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi.
4. Peningkatan Sarana dan prasarana kantor dan aparatur secara bertahap.